

FUNGSI PESANTREN SALAF DALAM MENYIKAPI KONTROVERSI AGAMA DAN POLITIK MELALUI PERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA

Muhammad Nashrul Fardhiansyahi¹, Friendis Syani Amrulloh²

^{1,2}Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

¹fardhiansyahnashrul@gmail.com, ²friendissyani@gmail.com

ABSTRACT

Religious and political tensions in Indonesia have shown an increasing trend over the past decade, thereby demanding the role of religious institutions capable of functioning as conflict buffers. This article aims to critically analyze the function of pesantren in responding to religion–politics controversies through the perspective of religious moderation. The study employs a qualitative approach based on library research, utilizing content analysis techniques on authoritative works concerning religious moderation, pesantren, and religion–politics relations. The novelty of this research lies in the development of an integrative analytical framework that maps the function of pesantren not only within the educational sphere but also as a social mechanism for conflict buffering across three interconnected levels. The findings indicate that the effectiveness of pesantren as conflict buffers operates through: (1) the reproduction of inclusive religious reasoning rooted in the tradition of ikhtilaf within the study of classical Islamic texts (kitab kuning); (2) the mobilization of the kiai's charismatic authority in social de-escalation practices; and (3) the institutionalization of political neutrality through internal pesantren regulations. These findings reinforce the argument that pesantren are key actors in the architecture of religious moderation in Indonesia, while also offering a conceptual model of pesantren functions as socio-religious stabilizers within a multicultural democratic context. The implications of this study highlight the importance of strengthening the epistemic and institutional capacities of pesantren in addressing contemporary religious and political contestations.

Keywords: pesantren, religious moderation, religion and politics, conflict buffer

ABSTRAK

Ketegangan agama dan politik di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dalam satu dekade terakhir, sehingga menuntut peran institusi keagamaan yang mampu berfungsi sebagai penyangga konflik. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis fungsi pesantren dalam merespons kontroversi agama-politik melalui perspektif moderasi beragama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan teknik analisis isi (content analysis) terhadap karya-karya otoritatif tentang moderasi beragama, pesantren, dan relasi agama–politik. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analitis integratif yang memetakan fungsi pesantren tidak

hanya pada ranah edukatif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial penyangga konflik pada tiga level yang saling berkelindan. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pesantren sebagai buffer konflik bekerja melalui: (1) reproduksi nalar keagamaan inklusif berbasis tradisi ikhtilaf dalam kajian kitab kuning; (2) mobilisasi otoritas karismatik kiai dalam praktik de-eskalasi sosial; dan (3) institusionalisasi netralitas politik melalui regulasi internal pesantren. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pesantren merupakan aktor kunci dalam arsitektur moderasi beragama di Indonesia, sekaligus menawarkan model konseptual fungsi pesantren sebagai stabilisator sosial-religius dalam konteks demokrasi multikultural. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas epistemik dan kelembagaan pesantren dalam menghadapi kontestasi agama dan politik kontemporer.

Kata kunci: pesantren, moderasi beragama, agama dan politik, buffer konflik

A. Pendahuluan

Ketegangan antara agama dan politik di Indonesia sering kali menjadi pemicu polarisasi sosial yang tajam, terutama pasca-kontestasi politik elektoral dalam satu dekade terakhir. Fenomena politisasi agama dan penggunaan sentimen keagamaan sebagai instrumen meraih kekuasaan telah mengancam kohesi nasional dan keharmonisan beragama. Dalam konteks ini, moderasi beragama/wasathiyyah muncul sebagai paradigma krusial untuk menyeimbangkan klaim kebenaran agama dengan realitas politik yang majemuk. Sebagaimana ditegaskan oleh Shihab, moderasi bukanlah kompromi akidah, melainkan sikap adil dan seimbang dalam memandang

realitas sosial yang kompleks agar tidak terjatuh pada ekstremisme.

Sebagai institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia, pesantren memiliki posisi strategis sebagai benteng pertahanan nilai-nilai moderasi. Pesantren bukan sekadar pusat transmisi ilmu keagamaan tafaquh fiddin, tetapi juga berfungsi sebagai mediator sosial yang memiliki otoritas moral di mata masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi pesantren saat ini semakin berat. Di satu sisi, pesantren diharapkan menjadi penengah dalam kontroversi politik-keagamaan, di sisi lain, tarikan kepentingan politik praktis terkadang masuk ke dalam ruang-ruang sakral pesantren, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menggerus

kredibilitas pesantren sebagai rujukan moral yang netral.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji moderasi beragama di lingkungan pesantren, baik dari aspek integrasi kurikulum maupun peran kiai dalam menjaga stabilitas sosial. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat parsial dan cenderung memisahkan antara fungsi edukatif pesantren dan dinamika politik-keagamaan yang berkembang di ruang publik. Dengan kata lain, masih terbatas studi yang secara spesifik menguraikan mekanisme fungsional pesantren dalam meredam kontroversi yang secara simultan memadukan isu agama dan politik. Kekosongan inilah yang menunjukkan adanya research gap dalam kajian moderasi beragama berbasis kelembagaan pesantren.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis fungsi pesantren dalam menyikapi kontroversi agama dan politik melalui perspektif moderasi beragama. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana pesantren mengoperasikan perangkat epistemologinya seperti tradisi kajian kitab kuning yang inklusif serta memanfaatkan otoritas karismatik kiai dalam melakukan de-eskalasi konflik

di masyarakat. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada perumusan model konseptual peran pesantren sebagai penyangga buffer konflik agama-politik sekaligus sebagai stabilisator sosial dalam konteks demokrasi Indonesia yang majemuk.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan digunakan karena fokus kajian berada pada analisis konseptual mengenai fungsi pesantren dalam menyikapi kontroversi agama dan politik melalui perspektif moderasi beragama. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam berbagai sumber tertulis yang relevan untuk membangun sintesis konseptual yang komprehensif. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian pemikiran dan kajian keislaman yang bertumpu pada analisis literatur otoritatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan sosiologis. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah gagasan moderasi beragama, fungsi

kelembagaan pesantren, serta relasi agama dan politik dalam kerangka teoritis. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami peran sosial pesantren dalam meredam potensi konflik di tengah masyarakat yang majemuk.

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa karya-karya otoritatif yang secara substantif membahas moderasi beragama dan pesantren, terutama buku Moderasi Beragama terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, karya M. Quraish Shihab tentang wasathiyah, serta pemikiran Azyumardi Azra mengenai pendidikan Islam dan pesantren. Adapun data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi, prosiding, buku pendukung, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengorganisasi literatur yang berkaitan dengan moderasi beragama, pesantren, serta relasi agama dan politik. Analisis data menggunakan teknik analisis isi

(content analysis) yang bertujuan mengungkap makna, pola, dan hubungan konseptual dari berbagai sumber tertulis. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) reduksi data dengan menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian; (2) kategorisasi data berdasarkan tema fungsi pesantren pada level epistemologis, sosiologis, dan institusional; (3) sintesis konseptual untuk menemukan pola peran pesantren dalam merespons kontroversi agama-politik; dan (4) penarikan kesimpulan secara induktif.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur yang kredibel dan mutakhir. Dengan langkah tersebut, penelitian ini tidak hanya merangkum literatur, tetapi juga menghasilkan sintesis konseptual mengenai fungsi pesantren sebagai penyangga konflik agama dan politik dalam kerangka moderasi beragama.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Kontroversi Agama dan Politik di Lingkungan Pesantren

Dalam beberapa tahun terakhir, isu agama dan politik sering saling bersinggungan dan menimbulkan perdebatan di masyarakat. Dampaknya juga dirasakan oleh pesantren, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk kontroversi yang sering muncul antara lain: penggunaan dalil agama untuk mendukung calon politik tertentu, perbedaan sikap politik antar warga pesantren, serta munculnya narasi intoleran seperti saling menyalahkan atau mengkafirkan pihak lain.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pesantren umumnya berusaha tidak terjebak dalam politik praktis, karena dikhawatirkan dapat memecah persatuan santri dan mengganggu proses pendidikan. Pesantren pada umumnya berupaya menjaga posisi sebagai lembaga pendidikan dan moral namun dalam konteks tertentu, penetrasi kepentingan politik tetap menjadi tantangan laten yang berpotensi menguji konsistensi netralitas kelembagaan. bukan

sebagai alat kepentingan politik tertentu. Sikap ini terlihat, misalnya, pada Pesantren Tegalsari Ponorogo yang secara sadar menjaga jarak dari konflik politik demi menjaga stabilitas internal pesantren dan kepercayaan masyarakat.

Peran Pesantren sebagai Penyangga (Buffer) Konflik Agama Dan Politik

Pesantren memiliki peran penting sebagai penyangga sosial yang mampu meredam ketegangan akibat kontroversi agama dan politik. Peran ini dapat dilihat pada tiga level berikut.

1. Level Keilmuan (Epistemologis)

Pada level epistemologis, pesantren mengoperasikan fungsi moderasi melalui tradisi transmisi keilmuan berbasis kajian kitab kuning yang sarat dengan khazanah ikhtilaf ulama. Berbeda dengan model pembelajaran yang menekankan homogenisasi pandangan, pedagogi pesantren justru membiasakan santri berinteraksi dengan keragaman otoritas fikih dan teologi. Proses ini secara struktural membentuk apa yang dapat disebut sebagai epistemic humility, yakni kesadaran bahwa kebenaran fikih bersifat ijtihadi dan

membuka ruang perbedaan yang legitim.

Temuan ini menunjukkan bahwa tradisi ikhtilaf di pesantren tidak sekadar berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi bekerja sebagai mekanisme internal moderasi yang mencegah pembentukan pola keberagamaan eksklusif. Dengan terbiasanya santri membaca perbedaan pendapat ulama dalam satu isu, konstruksi kebenaran keagamaan menjadi lebih kontekstual dan tidak mudah direduksi ke dalam klaim tunggal yang absolut. Hal ini sejalan dengan temuan Hadiyanto dkk. yang menegaskan bahwa kultur intelektual pesantren berkontribusi signifikan dalam membentuk sikap moderat di kalangan santri dan mencegah pembentukan pola pikir eksklusif dan tidak mudah menyalahkan pihak lain.

Penelitian menunjukkan bahwa tradisi keilmuan pesantren sangat efektif dalam menanamkan sikap moderat karena santri tidak diajarkan satu kebenaran tunggal, melainkan diajak memahami konteks dan perbedaan pendapat secara bijak.

Perspektif ini sejalan dengan konsep wasathiyah yang menekankan keseimbangan dan

keadilan dalam memahami ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan oleh M. Quraish Shihab bahwa moderasi beragama menuntut kemampuan membaca keragaman pendapat ulama secara proporsional dan tidak ekstrim.

2. Level Sosial (Sosiologis)

Pada level sosiologis, pesantren menjalankan fungsi moderasi melalui peran kyai sebagai figur sentral dalam kehidupan sosial pesantren. Dalam kultur pesantren, kiai tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai otoritas moral yang dihormati oleh santri dan masyarakat sekitar. Posisi ini membuat kiai memiliki pengaruh kuat dalam merespons isu-isu sensitif yang berkaitan dengan agama dan politik.

Ketika muncul ketegangan di masyarakat, kiai biasanya mengambil peran sebagai penenang melalui pengajian, nasihat keagamaan, dan keteladanan sikap. Pengaruh ini bekerja efektif karena hubungan antara kiai dan santri bersifat personal dan dilandasi kepercayaan yang tinggi. Kondisi tersebut membuat arahan kiai relatif mudah diterima dan diikuti oleh komunitas pesantren. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hadiyanto dkk. yang menunjukkan

bahwa figur kiai berperan penting dalam membentuk sikap moderat di lingkungan pesantren.

Lebih jauh, kepemimpinan kiai yang karismatik dan inklusif berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi sosial yang bekerja secara kultural, bukan melalui pendekatan koersif. Studi Rofiq dan Mujahidin juga menegaskan bahwa otoritas kiai di pesantren mampu menjaga kohesi sosial sekaligus menanamkan nilai komitmen kebangsaan dan toleransi di tengah menguatnya kontestasi politik. Dengan demikian, pada level sosiologis, pesantren melalui figur kyai dapat dipahami sebagai agen penting dalam meredam potensi konflik agama dan politik di masyarakat.

Peran kiai sebagai penyejuk sosial ini juga sejalan dengan karakter pesantren sebagai institusi penjaga tradisi Islam moderat di Indonesia yang menekankan keseimbangan antara otoritas keilmuan dan tanggung jawab sosial.

3. Level Kelembagaan (Institusional)

Secara normatif, penguatan moderasi melalui tata kelola kelembagaan juga sejalan dengan kerangka moderasi beragama yang

menempatkan institusi pendidikan Islam sebagai aktor strategis dalam menjaga harmoni sosial. Dalam konteks historis, Azra juga menegaskan bahwa pesantren memiliki fungsi sosial-keagamaan yang adaptif dalam merespons dinamika masyarakat Indonesia

Pada level kelembagaan, pesantren menjalankan fungsi moderasi melalui pengaturan institusional yang dirancang untuk menjaga independensi ruang pendidikan dari tarik-menarik politik praktis. Banyak pesantren menetapkan batasan formal maupun informal terhadap aktivitas politik di lingkungan pendidikan, seperti larangan kampanye partai di area pesantren, pembatasan penggunaan atribut politik dalam kegiatan santri, serta penegasan posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa moderasi di pesantren tidak hanya dibangun melalui wacana keagamaan, tetapi juga dilembagakan dalam tata kelola organisasi. Dengan kata lain, pesantren berupaya menciptakan institutional buffering mechanism yang berfungsi mencegah infiltrasi konflik politik ke dalam ruang

pendidikan. Studi Athoillah dkk. menegaskan bahwa kebijakan kelembagaan pesantren merupakan instrumen penting dalam menjaga praktik moderasi beragama secara berkelanjutan.

Kebijakan tersebut merupakan sikap kehati-hatian institusional yang berkontribusi pada terpeliharanya kepercayaan publik terhadap pesantren sebagai otoritas moral yang relatif netral. Penelitian Sutrisnawati dan Pangestuti juga menunjukkan bahwa konsistensi kebijakan internal pesantren berperan signifikan dalam mencegah fragmentasi sosial di lingkungan pendidikan Islam. Dengan demikian, pada level institusional, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai sistem sosial yang secara sadar membangun pagar organisasi untuk meredam potensi konflik agama dan politik.

Strategi Moderasi Beragama dalam Kurikulum dan Dakwah Pesantren

Pesantren tidak hanya mengajarkan moderasi beragama pada tataran konseptual, tetapi juga mengimplementasikannya secara sistematis dalam praktik pendidikan dan dakwah sehari-hari. Implementasi

ini menunjukkan bahwa moderasi di pesantren bekerja melalui proses internalisasi nilai yang berlapis, bukan sekadar penyampaian materi normatif. Setidaknya terdapat tiga strategi utama yang menonjol:

1. Integrasi nilai moderasi dalam kurikulum

Nilai seperti toleransi, cinta tanah air, penolakan terhadap kekerasan, dan penghargaan terhadap budaya lokal dimasukkan ke dalam materi pelajaran, baik secara formal maupun informal. Dengan cara ini, santri memahami bahwa nilai moderasi merupakan bagian dari ajaran Islam yang diajarkan melalui berbagai mata pelajaran dan pengajian, bukan materi yang berdiri sendiri. Hidden curriculum menunjukkan bahwa pendidikan nilai tidak selalu diajarkan secara eksplisit, tetapi ditanamkan melalui pembiasaan, interaksi sosial, dan pengalaman konkret santri.

Pola ini membuat moderasi tidak hadir sebagai mata pelajaran yang terpisah, tetapi melekat dalam keseluruhan proses pendidikan pesantren. Pendekatan integratif ini sejalan dengan kerangka moderasi beragama yang menekankan

pentingnya internalisasi nilai secara holistik dalam pendidikan Islam.

2. Pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari

Santri dilatih hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda latar belakang melalui kegiatan sosial, dakwah kultural, dan dialog keagamaan yang santun. Pembiasaan ini membuat santri terbiasa bersikap terbuka dan menghargai perbedaan dalam praktik kehidupan nyata, baik di dalam maupun di luar lingkungan pesantren.

Melalui proses habituasi ini, nilai moderasi tidak berhenti pada tataran kognitif, tetapi berkembang menjadi disposisi sosial yang nyata. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hadiyanto dkk. yang menegaskan bahwa pengalaman sosial di pesantren berkontribusi signifikan terhadap pembentukan sikap moderat santri

3. Keteladanan kiai dan ustaz

Salah satu faktor utama keberhasilan implementasi moderasi beragama adalah visi moderat pengasuh pesantren serta praktik pendidikan berbasis keteladanan. Moderasi beragama diajarkan melalui contoh nyata dalam sikap dan perilaku pengasuh pesantren, bukan hanya

melalui ceramah. Nilai tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), dan i'tidal (adil) tercermin dalam kehidupan pesantren sehari-hari. Keteladanan tersebut memperkuat internalisasi nilai moderasi karena santri cenderung meniru sikap dan cara pandang kiai dan ustaz.

Pola keteladanan ini memperkuat proses transmisi nilai karena dalam kultur pesantren, otoritas moral kiai memiliki daya pengaruh yang tinggi. Studi Athoillah dkk. juga menegaskan bahwa konsistensi figur pendidik merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi moderasi beragama di pesantren.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menegaskan bahwa pesantren memiliki fungsi strategis dalam merespons kontroversi agama dan politik melalui kerangka moderasi beragama yang bekerja secara berlapis. Pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga transmisi keilmuan Islam, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mampu melakukan fungsi penyangga buffer terhadap potensi konflik keagamaan-politik di masyarakat.

Fungsi tersebut beroperasi melalui tiga level yang saling berkelindan. Pada level epistemologis, tradisi kajian kitab kuning yang sarat khazanah ikhtilaf membentuk nalar keagamaan santri yang lebih inklusif dan tidak mudah terjebak pada klaim kebenaran tunggal. Pada level sosiologis, otoritas karismatik kiai berfungsi sebagai mekanisme de-eskalasi kultural yang efektif dalam menjaga kohesi sosial. Adapun pada level institusional, kebijakan pembatasan politik praktis menunjukkan adanya upaya sadar pesantren dalam membangun institutional buffering mechanism guna menjaga netralitas ruang pendidikan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan kerangka analitis integratif yang memetakan fungsi moderatif pesantren tidak hanya pada dimensi edukatif, tetapi juga pada dimensi sosial dan kelembagaan secara simultan. Temuan ini memperkaya kajian moderasi beragama dengan menempatkan pesantren sebagai aktor kunci dalam arsitektur stabilisasi sosial-religius di Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan pentingnya

penguatan kapasitas epistemik, otoritas kultural kiai, serta tata kelola kelembagaan pesantren agar tetap adaptif menghadapi intensifikasi politisasi agama di ruang publik. Ke depan, penelitian lapangan berbasis studi kasus mendalam diperlukan untuk menguji secara empiris model konseptual fungsi penyangga pesantren yang dirumuskan dalam studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Azra, A. (2014). Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=TTvNDwAAQBAJ>
- Kementerian Agama RI. (2019). Moderasi beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Krippendorff, K. (2026). Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/content-analysis/book258450>
- Shihab, M. Q. (2019). Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama. Lentera Hati Group.
- Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.

<https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ>

Artikel :

Nasution, M. R. (2023). The role of pesantren in countering radicalism: A case study of Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(01).

<https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.5389>

Jurnal :

Athoillah, M., Rahman, A. S., Firdaus, A. S., & Septiadi, M. A. (2024). Policies and practices of religious moderation in pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 387–396.
<https://doi.org/10.15575/jpi.v10i2.27543>

Hadiyanto, A., Hanafi, Y., Barnannsyah, R. M., Samitri, C., & Ulfah, S. M. (2022). Moderation patterns of pesantren in Indonesia: A study on the perceptions and responses of kyai, teachers and santri. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 6(1), 81–100.
<https://doi.org/10.21009/hayula.006.01.05>

Oktaviana, W. A., & Rofiq, M. (2025). Implementasi moderasi beragama dalam pendidikan pesantren di tengah masyarakat multikultural: Studi kasus pondok pesantren Kauman Lasem. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 24(3), 907–918.
<https://doi.org/10.29138/lentera.v24i3.1807>

Rofiq, A. C., & Mujahidin, A. (2025). Religious, socio-cultural, and political moderation in pesantren Tegalsari, Ponorogo. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 8(2), 245.
<https://doi.org/10.30829/juspi.v8i2.19481>

Sutrisnawati, M. S., & Pangestuti, R. (2024). Pesantren sebagai media moderasi beragama di Indonesia. *Jurnal Penelitian Agama*, 25(1), 89–103.
<https://doi.org/10.24090/jpa.v25i1.2024.pp89-103>